

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai salah satu negara maritim di dunia, luas wilayah laut Indonesia mencapai 5,8 juta km² atau 2/3 dari luas wilayah Republik Indonesia dan panjang pantai 95.181 km. Dengan luasnya wilayah laut yang dimiliki Indonesia, tentu terdapat pula berbagai potensi di dalamnya, khususnya potensi perikanan yang menjadi komoditas penting bagi dunia.

Usaha perikanan di Indonesia terdiri dari perikanan tangkap dan perikanan darat atau perikanan budidaya. Perikanan tangkap merupakan kegiatan penangkapan ikan yang difokuskan pada perikanan yang berasal dari alam, dalam hal ini perikanan laut. Sektor perikanan tangkap merupakan kegiatan utama yang sudah berlangsung dari zaman dahulu karena luasnya wilayah laut Indonesia dan potensi perikanan di dalamnya serta tidak memerlukan proses yang panjang seperti perikanan budidaya. Meskipun begitu, dalam perkembangannya capaian dari perikanan tangkap semakin tertinggal dari perikanan budidaya. Fenomena ini terjadi karena pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap masih didominasi oleh usaha perikanan rakyat dengan skala usaha kecil, penggunaan teknologi yang sederhana, serta jangkauan operasi penangkapan yang terbatas¹. Kapasitas produksi sektor perikanan Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut.

¹Widodo, Johanés & Suadi. *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta. 2006, hlm 2

Tabel 1.1 Kapasitas Produksi Sektor Perikanan Indonesia

No	Rincian	Capaian				Target
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Perikanan Tangkap (dalam juta ton)	5,38	5,41	5,81	5,47	5,50
2	Perikanan Budidaya (dalam juta ton)	6,28	7,90	9,45	13,02	16,89
3	Total Produksi Perikanan (dalam juta ton)	11,66	13,31	15,62	18,49	22,39

Sumber: Kelautan dan Perikanan Dalam Angka 2015

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pada tahun pertumbuhan hasil produksi perikanan tangkap tidak secepat perikanan budidaya padahal sektor perikanan tangkap memiliki potensi luas wilayah laut yang lebih luas dari perikanan budidaya. Rendahnya produksi perikanan tangkap tentu juga berdampak pada masih rendahnya pendapatan nelayan sektor perikanan tangkap. Kenyataan ini tentu menjadi sebuah ironi bagi masyarakat pesisir yang tidak mendapatkan manfaat maksimal dari potensi sumber daya perikanan yang ada di sekitarnya.

Untuk meningkatkan hasil produksi perikanan tangkap, dibutuhkan kebijakan berupa program-program yang dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama nelayan pesisir yang masih belum bisa dikatakan sejahtera, kemudian dalam skala yang lebih luas dapat meningkatkan nilai produksi perikanan nasional secara keseluruhan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan mencanangkan rencana strategis yang diwujudkan ke dalam Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan tujuan meningkatnya produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap berbasis pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan serta meningkatnya kesejahteraan nelayan. Sasarannya adalah meningkatnya produksi

perikanan tangkap di perairan laut dan umum, meningkatnya pendapatan nelayan dan meningkatnya nilai tukar nelayan.

Salah satu dari program Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap ini diwujudkan melalui enam kegiatan, yaitu: 1) Pengelolaan Sumberdaya Ikan, 2) Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan, 3) Pengembangan, Penguasaan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, 4) Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib dan Berkelanjutan, 5) Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil, dan 6) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Ditjen Perikanan Tangkap.²

Masalah minimnya manfaat potensi kelautan terhadap nelayan juga terjadi di Sumatera Barat yang berdampak pada masih minimnya produksi perikanan tangkap di Provinsi ini. Sebagai provinsi yang berada di wilayah pesisir pantai dengan luas Zona Ekonomi Eksklusif mencapai 186.580 km² dan panjang garis pantai 2.420.357 km, sektor kelautan dan perikanan sangatlah bernilai. Potensi perairan di Sumatera Barat antara lain ikan laut, ikan air tawar, *mangrove*, terumbu karang, padang lamun, rumput laut, penyu dan lain-lain. Pada tahun 2013 produksi perikanan tangkap di Sumatera Barat tercatat mencapai 227.278,8 ton.³

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sumatera Barat Tahun 2010-2015, pengembangan perikanan tangkap di Provinsi Sumatera

² Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor : KEP.9/DJ-PT/2014

³Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat. Perikanan Tangkap Berperan Wujudkan Ketahanan Pangan. Diakses di <http://bkp.sumbarprov.go.id/berita-316-perikanan-tangkap-berperan-wujudkan-ketahanan-pangan.html> pada tanggal 12 november 2016 pukul 11.31 WIB

Barat berada pada dua Kota dan lima Kabupaten yaitu Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai serta yang terakhir Kabupaten Padang Pariaman.⁴ Namun banyaknya wilayah pengembangan perikanan tangkap yang ada di Sumatera Barat masih belum mampu mendorong meningkatnya produksi perikanan tangkap yang tentunya berakibat pada belum baiknya perekonomian masyarakat khususnya masyarakat pesisir atau masyarakat nelayan di Sumatera Barat.

Salah satu daerah yang memiliki wilayah laut di Provinsi Sumatera Barat adalah Kabupaten Padang Pariaman yang tercatat sebagai Kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi paling tinggi diantara 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan 7,12% pada tahun 2015⁵ dimana perikanan merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini menjadi alasan peneliti untuk memilih Kabupaten Padang Pariaman sebagai daerah penelitian.

Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi besar di sektor perikanan tangkap karena memiliki panjang garis pantai mencapai 60,5 km⁶ namun potensi itu masih belum dimanfaatkan dengan maksimal. Permasalahan utamanya adalah masih rendahnya pendapatan nelayan dan rendahnya produksi perikanan tangkap karena penangkapan ikan masih bersifat tradisional dan armada penangkapan hanya perahu motor tempel, maka dibutuhkan faktor pendorong dengan penambahan armada kapal motor dan pengembangan perikanan tuna

⁴ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sumatera Barat Tahun 2010-2015

⁵ Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015. Diakses di <http://padangpariamankab.go.id> pada tanggal 12 November

⁶ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2015, hlm 9

longline. Untuk kapasitas produksi perikanan tangkap di Kabupaten Pariaman dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2 Kapasitas Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah (ton)
1	Batang Anai	5.211,41
2	Batang Gasan	2.933,94
3	Nan Sabaris	3.832,81
4	Sungai Limau	3.257,41
5	Ulakan Tapakis	3.922,09
6	V Koto Kampung Dalam	3.562,64
Jumlah		22,720.30

Sumber : Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan Tahun 2015

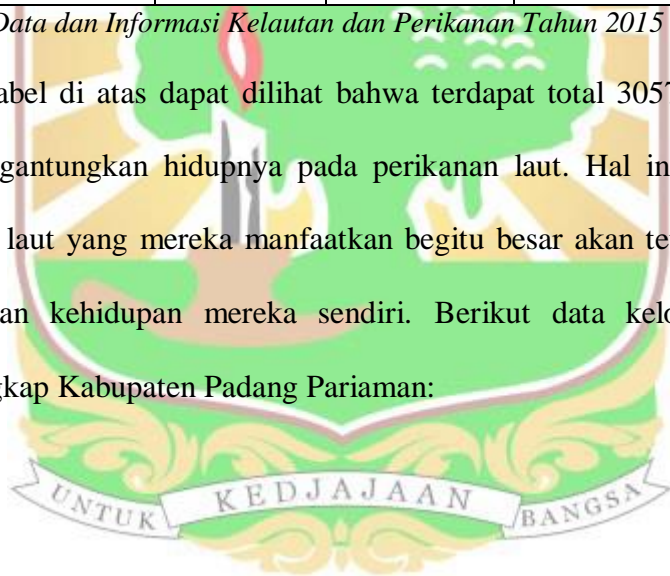
Dari tabel 1.2 diatas juga terlihat bahwa ada 6 daerah Kecamatan dari 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman yang berada di wilayah pesisir pantai yang memiliki potensi dibidang perikanan tangkap. Pengelolaan perikanan tangkap tersebut masih banyak dilakukan oleh nelayan tradisional yang dikategorikan sebagai rumah tangga perikanan yaitu rumah tangga yang mata pencaharian erat kaitannya dengan kegiatan utama pada sektor perikanan tangkap. Jumlah rumah tangga perikanan di Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3 Rumah Tangga Perikanan di Kabupaten Padang Pariaman 2015

No	Kecamatan	Nelayan			
		Penuh	Sambilan utama	Sambilan Tambahan	Jumlah
1	Batang Gasan	73	159	178	410
2	Sungai Limau	272	338	465	1.075
3	V Koto Kp. Dalam	13	8	94	115
4	Nan Sabaris	21	25	59	105
5	Ulakan Tapakis	294	214	478	986
6	Batang Anai	76	75	215	366
Jumlah		749	819	1489	3057

Sumber : Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan Tahun 2015

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat total 3057 rumah tangga nelayan menggantungkan hidupnya pada perikanan laut. Hal ini menjadi ironi ketika potensi laut yang mereka manfaatkan begitu besar akan tetapi tidak dapat mensejahterakan kehidupan mereka sendiri. Berikut data kelompok nelayan perikanan tangkap Kabupaten Padang Pariaman:



Tabel 1.4 Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Kabupaten Padang Pariaman

No	Nama Kelompok	Kecamatan	Nagari (Desa)	Tahun Berdiri	Bidang Usaha
1	Citra Bahari	Batang Gasan	Batang Gasan	2003	Penangkapan
2	Muaro Jaya	Nan Sabaris	Sunur	2010	Penangkapan
3	Semoga Jaya	Ulakan Tapakis	Ulakan	2009	Penangkapan
4	Riak Gabuo	Ulakan Tapakis	Ulakan	2009	Penangkapan
5	Nurul Bahari	Ulakan Tapakis	Tapakis	2010	Penangkapan
6	Tunas Baru	Batang Anai	Ketaping	2005	Penangkapan
7	Citra Bahari II	Batang Gasan	Gasang Gadang	2003	Penangkapan
8	Sejahtera Laut	Sungai Limau	Guguk Kuranji Hilir	2011	Penangkapan
9	Elang Sakti	Sungai Limau	Koto Tinggi Kuranji Hilir	2009	Penangkapan
10	Pincalang Jaya	Ulakan Tapakis	Ulakan	2009	Penangkapan
11	Tiram Indah	Ulakan Tapakis	Tapakis	2009	Penangkapan
12	Mutiara Laut	Batang Anai	Ketaping	2005	Penangkapan
13	Baronang	Batang Anai	Ketaping	2012	Penangkapan
14	Pasie Loge	Ulakan Tapakis	Ulakan	2011	Penangkapan
15	Batang Mangau	Nan Sabaris	Sunur	2011	Penangkapan
16	Mekar Samudera	Sungai Limau	Kuranji Hilir	2012	Penangkapan

Sumber: Data dan Informasi Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2015

Tabel 1.4 tersebut merupakan kelompok nelayan perikanan tangkap yang ada di Kabupaten Padang Pariaman yang secara bergantian akan menerima bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman. Kelompok nelayan tersebut tersebar di enam kecamatan yang berbatasan langsung dengan laut.

Besarnya potensi perikanan tangkap semestinya dapat mensejahterakan masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Hal ini disebabkan wilayah pesisir dan pantai merupakan kantong-kantong kemiskinan masyarakat nelayan. Penyebab utama kemiskinan nelayan tersebut disebabkan banyak faktor seperti kondisi lingkungan sumber daya, budaya, dan struktural (keberpihakan pemerintah). Dari ketiga masalah tersebut, masalah struktural merupakan yang paling penting, sehingga sangat diperlukan kebijakan pemerintah yang berpihak pada kehidupan masyarakat nelayan, khususnya nelayan tradisional⁷.

Berdasarkan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Padang Pariaman yaitu peningkatan pembangunan pertanian yang tangguh dan berdaya saing, dijabarkan lagi menjadi dua belas program yaitu :1) program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan,2) program penerapan teknologi pertanian perkebunan, 3) program peningkatan produksi hasil peternakan, 4) program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, 5) program peningkatan penerapan teknologi peternakan, 6) program pengembangan perikanan tangkap, 7) program pengembangan budidaya perikanan, 8) program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar, 9) program peningkatan kesejahteraan petani, 10) program pengembangan industri kecil dan menengah industri, 11) program peningkatan kemampuan teknologi industri industri, dan 12) program pengembangan sistem penyuluhan perikanan.⁸

Dari prioritas pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman tersebut salah satu dari 12 program turunannya adalah program pengembangan perikanan

⁷Akhmad solihin, *Politik Hukum, Kelautan dan Perikanan: Isu, Permasalahan, dan Telaah Kritis Kebijakan*, Nuansa Aulia: Bogor, 2010, hlm 7

⁸*Op.cit.*, hlm 268

tangkap yang merupakan tanggung jawab Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang kelautan dan perikanan⁹ khususnya pada bidang perikanan tangkap.

Selanjutnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman mewujudkan program pengembangan perikanan tangkap tersebut menjadi delapan kegiatan. Rincian anggaran dan realisasi dari program pengembangan perikanan tangkap ini dapat dilihat pada tabel berikut :



⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No 10 Tahun 2011 Tentang Pembentukan SOTK Dinas Kabupaten Padang Pariaman

**Tabel 1.5 Anggaran Pelaksanaan Program Pengembangan
Perikanan Tangkap Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015**

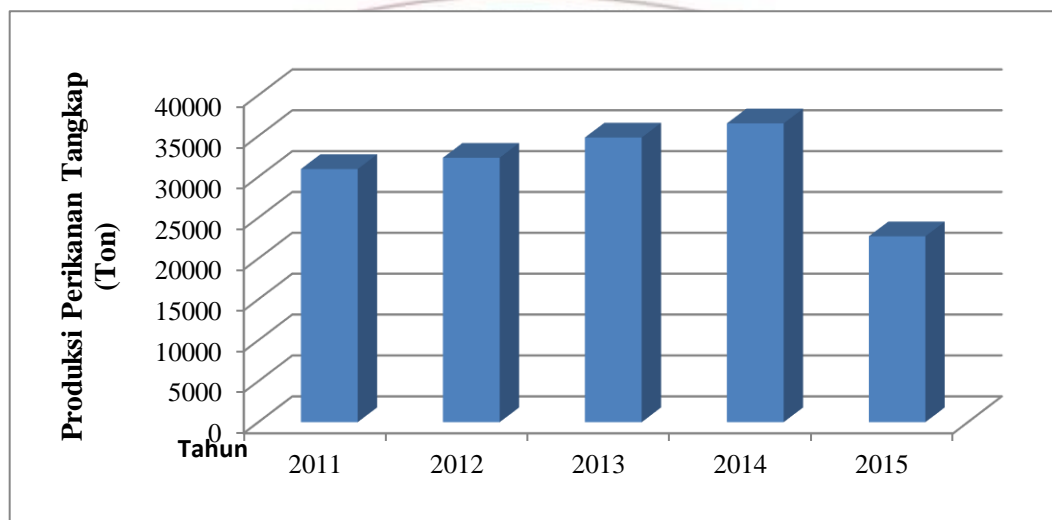
No	Nama Program dan Kegiatan	Keuangan		
		Anggaran	Realisasi	%
1	Operasional UPTD Wilayah II	40.000.000	28.035.050	70,09
2	Operasional UPTD Wilayah IV	20.000.000	19.969.800	99,85
3	Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Tangkap	20.000.000	19.920.000	99,60
4	Operasional dan Pengembangan Workshop PPI Pasir Baru	25.000.000	23.190.000	92,76
5	Pelatihan Teknologi Penangkapan Rajungan	30.000.000	29.494.000	98,31
6	Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan	15.000.000	14.350.000	95,67
7	Inventarisir/ Penandaan Kapal Penangkapan Ikan	20.000.000	19.962.000	99,81
8	Pelatihan Alat Tangkap Long Line	90.000.000	88.085.600	97,87

Sumber : Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan Tahun 2015

Dari tabel 1.5 terlihat bahwa semua anggaran kegiatan telah terealisasi dengan baik. Bahkan tujuh dari delapan kegiatan tersebut terealisasi di atas angka 90%. Hal tersebut ternyata masih menyisakan permasalahan seperti penurunan jumlah produksi perikanan laut, pendapatan masyarakat nelayan yang tidak mencukupi (*output*).Tingkat pendapatan nelayan/bulan Kabupaten Padang Pariaman terealisasi Rp. 1.456.604,- dari target Rp. 1.730.000,- yang ditetapkan dalam Renstra. Sedangkancapaian indikator tingkat rata-rata pendapatan pembudidaya/bulan terealisasi Rp.2.200.588 (dengan tingkat persentase capaian 100,20 %) dari target Rp. 2.196.150,- yang ditetapkan

dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2011-2015¹⁰. dan kesejahteraan nelayan perikanan tangkap yang belum maksimal (*outcome*). Kondisi tersebut bertolakbelakang dengan tujuan program ini yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan dan produksi perikanan. Berikut jumlah produksi perikanan tangkap Kabupaten Padang Pariaman.

Tabel 1.6 Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011-2015 (dalam ton)



Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa produksi perikanan tangkap di Kabupaten Padang Pariaman terjadi peningkatan dari tahun 2011 sampai tahun 2014, tetapi kemudian terjadi penurunan jumlah produksi pada tahun 2015. Hal tersebut menunjukkan bahwa penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2015, sedangkan realisasi anggarannya berjalan sangat baik. Bahkan yang tertinggi mencapai angka 99,85%.

Hal ini menjadi alasan peneliti untuk meneliti Program Pengembangan Perikanan Tangkap di Kabupaten Padang Pariaman sekaligus menjadi alasan peneliti untuk membatasi penelitian ini dalam rentang tahun 2015.

¹⁰Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman

Fenomena yang terjadi dalam pembinaan teknis dan kelembagaan kepada kelompok nelayan adalah seperti dalam penetapan nelayan yang diberikan pembinaan. Seperti salah satu wawancara yang peneliti lakukan dengan Darisman, salah seorang nelayan yang mengatakan bahwa :

“nelayan yang mendapatkan pelatihan teknis dan kelembagaan hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki kedekatan dengan aparat nagari atau dengan petugas lapangan Dinas Kelautan dan Perikanan, sedangkan nelayan lain tidak mendapatkan pelatihan” (Hasil wawancara dengan Darisman, salah seorang nelayan di Pasir Baru, Kecamatan Sungai Lima pada hari Senin tanggal 14 November 2016 pada pukul 10.00-11.00)

Permasalahan lainnya yang terjadi seperti kelompok nelayan yang diberikan pembinaan hanya aktif ketika mendapatkan dana bantuan saja, artinya lembaga tersebut hanya digunakan sebagai alat untuk menerima bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman, tetapi dalam pelaksanaannya tidak berkelanjutan. Seperti yang dikatakan Edi, salah seorang nelayan yang mendapatkan pelatihan :

“lembaga kelompok nelayan ini hanya aktif dan beraktifitas jika ada bantuan yang turun dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman, sedangkan jika tidak ada bantuan, kelompok nelayan ini sama sekali tidak aktif, nelayan tetap melakukan aktifitas sendiri-sendiri tanpa kelompok resmi” (Hasil wawancara dengan Edi, salah seorang nelayan di Pasir Baru, Kecamatan Sungai Lima pada hari Senin tanggal 14 November 2016 pada pukul 11.00-12.00)

Kemudian dalam praktek di lapangan juga terdapat nelayan yang tidak memaksimalkan bantuan yang diberikan seperti menjual alat tangkap ikan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Youndri Louis, ST. M.Si Kepala seksi Sarana dan Prasarana sebagai berikut:

“ada masyarakat yang terkesan tidak berterimakasih kepada pemerintah. Mereka seandainya menjual alat tangkap ikan yang kami berikan. Dan kami akui itu juga kelalaian kami dalam melakukan pengawasan terhadap masyarakat. (Hasil Wawancara dengan Youndri Louis, Kasi Sarana dan Prasarana Dinas

Kelautan dan Perikanan kabupaten Padang Pariaman. pada hari rabu tanggal 16 November 2016 pada pukul 10.00-11.00)”

Dari permasalahan-permasalahan yang terjadi tersebut mengindikasikan bahwa terdapat beberapa fungsi yang tidak berjalan daripada program pengembangan perikanan tangkap tersebut. Ini dapat dikategorikan terhalangnya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman.

Agar anggaran yang direalisasikan untuk program pengembangan perikanan tangkap ini tidak berjalan sia-sia dibutuhkan manajemen yang baik dalam pelaksanaannya. Manajemen dibutuhkan agar program yang akan dilaksanakan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Secara etimologis kata manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno *management*, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Sedangkan secara terminologis Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan menyimpulkan manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹¹

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman melakukan fungsi Perencanaan. Pola perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman membentuk program pengembangan perikanan tangkap. Hal ini dijelaskan berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Youndri Louis, ST. M.Si Kepala seksi Sarana dan Prasarana sebagai berikut:

“Perencanaan yang dilakukan diawali dengan musrenbang dengan melibatkan masyarakat, kemudian hasilnya tersebut diteruskan ke masing-masing SKPD termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya Dinas Kelautan dan Perikanan akan

¹¹Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen, Dasar, Pengertian dan Masalah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004 hlm 1.

menyaring rencana mana yang menjadi prioritas untuk nantinya diusulkan kepada tim anggaran Bappeda untuk bisa disahkan. Salah satu hasil dari rangkaian proses perencanaan tersebut adalah program pengembangan perikanan tangkap ini. (Hasil Wawancara dengan Youndri Loeis, Kasi Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Padang Pariaman. pada hari rabu tanggal 16 November 2016 pada pukul 10.00-11.00) ”

Berdasarkan hasil wawancara dilihat terlihat bahwa perencanaan dari program pengembangan perikanan tangkap ini dilakukan melalui beberapa tahap yaitu usulan dari masyarakat terkait Pengembangan Perikanan Tangkap melalui musrenbang. Kemudian rencana program tersebut nantinya akan dipilih rencana mana yang menjadi prioritas untuk dimasukkan kedalam rencana kerja dinas tersebut untuk satu tahun anggaran. Rencana kerja tersebut kemudian disusun kedalam program program salah satunya yaitu Program Pengembangan Perikanan Tangkap tersebut.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan program pengembangan perikanan tangkap ini yaitu dengan membagi dan menyerahkan kegiatan kegiatan yang ada dalam program pengembangan perikanan tangkap ini kepada bidang bidang yang sesuai dengan tupoksi bidang bidang tersebut. Sesuai yang disampaikan kasi sarana dan prasarana, yang menyatakan bahwa :

“Masing masing kegiatan yang ada pada program pengembangan perikanan tangkap ini tanggungjawabnya ada pada bidang perikanan tangkap. Jadi dalam program pengembangan perikanan tangkap ini yang melaksanakan kegiatannya hanya bidang perikanan tangkap saja. (Hasil Wawancara dengan Youndri Loeis, Kasi Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Padang Pariaman. pada hari rabu tanggal 16 November 2016 pada pukul 10.00-11.00)”

Akan tetapi sumber daya yang terlibat langsung dalam program Pengembangan Perikanan Tangkap ini tidak semuanya memiliki kualifikasi yang semestinya. Hal ini dibenarkan oleh kasi sarana dan prasarana, sebagai berikut:

“ kebanyakan dari kami tidak mengerti seluruh proses manajemen program ini karena tidak memiliki latar belakang pendidikan mengenai perikanan maupun manajemen. (Hasil Wawancara dengan Youndri Loeis, Kasi Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Padang Pariaman, pada hari rabu tanggal 16 November 2016 pada pukul 10.00-11.00)”

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa kebanyakan dari pegawai dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman tidak memiliki kompetensi dalam bidang perikanan khususnya perikanan tangkap. Hal ini tidak sesuai dengan konsep *the right man in the right place*. Dimana setiap orang harus ditempatkan menurut keahlian dan kecakapannya¹² Pengorganisaian ini dirasa belum maksimal mengingat pegawai yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan tidak mengerti dengan apa yang akan dikerjakan.

Bentuk motivasi yang dilakukan oleh Dinas Kelautan Perikanan kabupaten Padang Pariaman pada program ini yaitu dengan pemberian peringatan kepada para pegawai yang belum melakukan tupoksinya dengan baik. Motivasi itu diberikan kepada seluruh pegawai yang ada pada Dinas Kelautan Perikanan kabupaten Padang Pariaman dan untuk semua Program yang ada termasuk Program pengembangan perikanan tangkap ini sendiri. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kasi Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan Perikanan kabupaten Padang Pariaman yaitu :

“*punishment* yang diberikan berupa peringatan peringatan yang diberikan kepada para pegawai yang belum melakukan tupoksinya

¹²Siagian, Sondang P. *Filsafat Administrasi*, Bumi Aksara: Jakarta, 2003 hlm 7

dengan baik. Jadi tidak ada punishment dalam bentuk pemotongan tunjangan dan lainnya. (Hasil Wawancara dengan Youndri Loeis, Kasi Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Padang Pariaman. pada hari rabu tanggal 16 November 2016 pada pukul 10.00-11.00)”

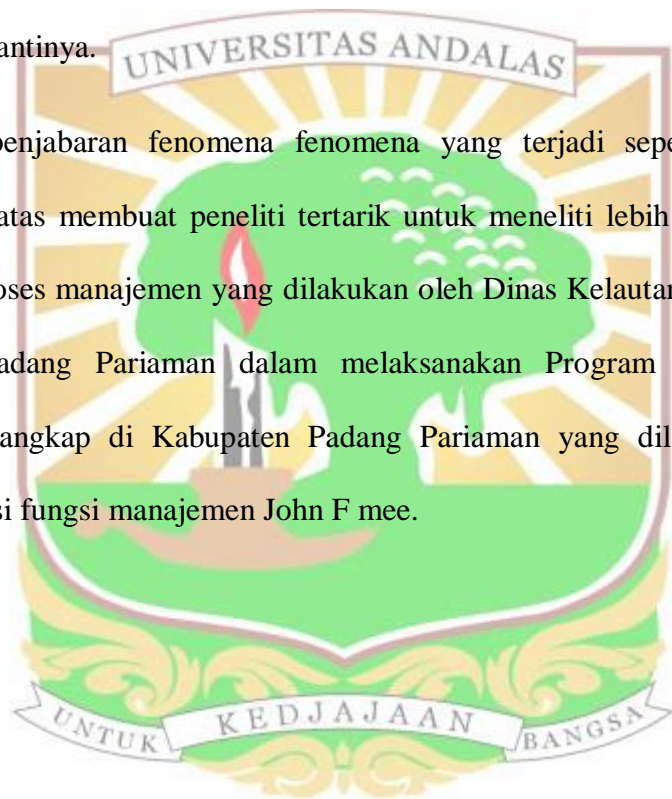
Dari pernyataan di atas terlihat bahwa telah ada *reward* and *punishment* yang diberikan oleh atasan kepada bawahannya di Dinas Kelautan Perikanan kabupaten Padang Pariaman. *Punishment* yang diberikan baru berupa peringatan-peringatan yang diberikan dari atasan kepada bawahan yaitu setiap hari senin Kepala dinas mengumpulkan semua pejabat struktural yang ada untuk mengecek sejauhmana tupoksi yang telah mereka laksanakan. Jika ada pegawai yang belum melaksanakan tupoksinya dengan baik maka pada saat itulah peringatan diberikan. Motivasi ini memang dirasakan belum maksimal karena belum adanya *reward* yang baik yang dilakukan pada Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman. Seharusnya setiap pemberian *punishment* harus diimbangi pula dengan pemberian *reward* bagi para bawahan.

Pengawasan dan evaluasi juga dilakukan setiap bulan oleh kepala dinas kepada setiap bidang yang ada pada Dinas Kelautan Perikanan kabupaten Padang Pariaman melalui laporan realisasi fisik dan keuangan. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Kasi Sarana dan Prasarana, yang menyatakan bahwa :

“Bentuk pengawasan yang dilakukan yaitu Kepala Dinas mengevaluasi setiap bidang yang ada melalui laporan realisasi fisik dan keuangan, bagaimana pelaksanaan program program dari setiap bidang tersebut. Evaluasi ini dilakukan setiap bulan oleh Kepala Dinas. Walaupun dalam prakteknya masih ada oknum nelayan yang menyalahgunakan bantuan yang kami berikan”. (Hasil Wawancara dengan Youndri Loeis, Kasi Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Padang Pariaman. pada hari rabu tanggal 16 November 2016 pada pukul 10.00-11.00)

Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa *controlling* atau pengawasan telah dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Kelautan Perikanan kabupaten Padang Pariaman. Pada program pengembangan perikanan tangkapsendiri evaluasi dilakukan pada masing masing bidang yang berfungsi sebagai pelaksana kegiatan kegiatan tersebut. Dengan adanya pengawasan yang baik dari atasan kepada bawahan maka diharapkan akan tercipta komunikasi yang baik dalam pelaksanaan program program yang ada. Sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik nantinya.

Dari penjabaran fenomena fenomena yang terjadi seperti yang telah dijelaskan di atas membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai bagaimana proses manajemen yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan Program Pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Padang Pariaman yang dilihat dari sudut pandang fungsi fungsi manajemen John F mee.



1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan salah satu tahap diantara sejumlah tahap penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Merujuk pada paparan di atas, maka diambil rumusan masalah guna pembahasan sebagai batasan penelitian yaitu Bagaimana Manajemen Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman 2015-2016?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan masalah tentang hal yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian dengan cara mempertimbangkan masalah yang terjadi dan membandingkan dengan yang seharusnya. Dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis Manajemen Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman 2015-2016.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1.4.1. Manfaat teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang manajemen terutama fungsi-fungsi manajemen tentang *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *motivating* (pemberian motivasi) dan *controlling* (pengawasan), apa saja yang harus ada didalam menerapkan ilmu manajemen, sebab tanpa kita sadari apa yang kita perbuat dalam hidup ini menggunakan ilmu manajemen, terutama dalam bidang organisasi baik swasta maupun pemerintah.

1.4.2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat dijadikan acuan dan masukan bagi pemerintah kabupaten Padang Pariaman terutama pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Masukan tersebut berupa informasi serta input positif yang bisa mendorong pemerintah dalam menghasilkan kinerja yang optimal kedepannya untuk memberikan layanan yang optimal di daerah.

